



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Ketut Suarjaya
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Kirana Pritasari, MQIH
Jabatan : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini sebagai pertimbangan penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pihak pertama dan kedua akan membahas ulang perjanjian ini bila terjadi perubahan kebijakan anggaran.

Pihak Kedua

dr. Kirana Pritasari, MQIH
NIP 196404081990032001

Denpasar, November 2020

Pihak Pertama,

Ketut Suarjaya
NIP 196201151987101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Nasional	Target Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembinaan Gizi Masyarakat	1. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan surveilans gizi 2. Persentase puskesmas yang menyelenggarakan tata laksana gizi buruk pada balita 3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	70% 20% 45%	70% 20% 65%
2.	Pembinaan Khatan Keluarga	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kesehatan balita 3. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja 4. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi 5. Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia	200 Kab/Kota 200 Kab/Kota 150 Kab/Kota 200 Kab/Kota 50%	4 Kab/Kota 6 Kab/Kota 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota 55,56%
3.	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kesehatan olahraga	334 Kab/Kota 334 Kab/Kota	7 Kab/ Kota 7 Kab/ Kota
4.	Penyehatan Lingkungan	1. Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) 2. Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 3. Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumannya sesuai standar 4. Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar 5. Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar 6. Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	50% 220 Kab/Kota 64% 3000 fasyankes 44% 60%	50% 9 Kab/Kota 64% 130 fasyankes 44% 60%
5.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat 2. Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif	35% 70%	35% 50%
6.	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen Kesehatan Masyarakat 2. Persentase kinerja RKAKL lingkup Kesehatan Masyarakat	57,5% 85%	57,5% 85%

Program

1. Program Kesehatan Masyarakat
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp. 9.407.431.000
Rp. 769.905.000

Direktur Jenderal
Kesehatan Masyarakat

dr. Kirana Pritasari, MQIH
NIP 196404081990032001



Denpasar, November 2020

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Bali

Ketut Suarjaya
NIP 196201151987101001

